



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 050/Kep/1032-Bapelitbangda/2017**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 9, Seri E.4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri S.3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kabupaten Cirebon, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kabupaten Cirebon.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal April 2017



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

Lampiran-Lampiran

Lampiran I : Keputusan Bupati Cirebon

Nomor :

Tanggal : April 2017

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2017

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2017**

Misi 1: Meningkatkan SDM yang berakhlak mulia yang berlandaskan pada pelaksanaan pendidikan agama yang baik

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya aktivitas kehidupan beragama dan kesalehan sosial masyarakat serta toleransi antar dan intern umat beragama	Angka melek huruf Al-Quran lulusan SD/MD	Lulusan SD yang bisa baca Al-Qur'an/seluruh lulusan bagi siswa muslim	%	54
		Angka Melek huruf Al-Quran lulusan SMP	Lulusan SMP yang bisa baca Al-Qur'an/seluruh lulusan bagi siswa muslim	%	61
		Angka Melek huruf Al-Quran lulusan SMA	Lulusan SMA yang bisa baca Al-Qur'an/seluruh lulusan bagi siswa muslim	%	66
		Angka Melek huruf Al-Quran lulusan SMK	Lulusan SMK yang bisa baca Al-Qur'an/seluruh lulusan bagi siswa muslim	%	66
		Jumlah siswa yang hafal juz 'amma pada pendidikan SLTP dan SLTA	Prosestase Siswa muslim lulusan SLTP dan SLTA yang hafal juz 'amma	%	5

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
		Jumlah DKM yang menyelenggarakan kegiatan ba'da maghrib mengaji	DKM yang menyelenggarakan kegiatan ba'da maghrib mengaji	DKM	424
		Jumlah penghafal Al-Qur'an	Jumlah penghafal Al-Qur'an yang dihasilkan pada tahun berjalan	Orang	1.005
		Prestasi lomba keagamaan tingkat Provinsi Jawa Barat	Perolehan peringkat MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat	Peringkat	5
		Jumlah kasus konflik yang bernuansa agama	Ada atau tidak adanya kejadian konflik agama	Kasus	5

Misi 2: Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berbudaya, berilmu dan berketrampilan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan kewirausahaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya pelayanan pendidikan untuk semua	Peningkatan Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan	%	83,00-84,27
		Angka Melek Huruf (AMH) pada penduduk usia 15 tahun ke atas	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang buta huruf dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	%	95
		Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,69
		Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA	Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan SMA/SMK	%	122 110,21 80,05
		Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI	Angka Partisipasi Murni SD, SMP dan SMA/SMK	%	99,94

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> - SMP/MTs - SMA/MA - SMK 			90,1 61,8 47,95
		Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per-usia tingkatan sekolah <ul style="list-style-type: none"> - SD - SMP - SMA/SMK 	Ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per-usia tingkatan sekolah Jumlah sekolah negeri dan swasta terhadap Jumlah penduduk usia sekolah SD (7-12 tahun) Jumlah sekolah negeri dan swasta terhadap jumlah penduduk usia sekolah SMP (13-15 tahun) Jumlah sekolah negeri dan swasta terhadap jumlah penduduk usia sekolah SMA (16-18 tahun)	%	49 19 21
2.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	-	Tahun	66,25
		Ratio Kematian Ibu	Jumlah ibu melahirkan dalam keadaan meninggal dunia pada saat melahirkan dibandingkan jumlah seluruh ibu melahirkan	Point	85,38
		Ratio kematian Bayi	Jumlah bayi yang dilahirkan dalam keadaan meninggal dibagi seluruh jumlah kelahiran bayi	Point	3,96
		Balita gizi buruk (BB/TB)	Berat badan dibandingkan dengan Tinggi badan. Data balita dihitung dari jumlah balita yang ditimbang	%	0,85
		Cakupan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin pada pelayanan dasar	Jumlah penduduk miskin yang berobat di PKM dibagi total penduduk yang mendapat jaminan kesehatan	Orang	1.345.865

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
		Rasio rumah sakit persatuan penduduk	Jumlah rumah sakit (swasta dan negeri) yang ada di Kabupaten Cirebon	%	0,054
		Rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk	Jumlah puskesmas, klinik (swasta dan negeri), dan puskesmas pembantu yang ada di Kabupaten Cirebon	%	0,055
		Jumlah puskesmas yang menyediakan pelayanan dokter anak dan kandungan	-	Unit	57
		Rasio dokter terhadap penduduk	Jumlah seluruh dokter yang bertugas di Kabupaten Cirebon	%	0,139
		Rasio paramedis terhadap penduduk	Jumlah seluruh paramedis yang bertugas di Kabupaten Cirebon	%	1,516
		Presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan dibandingkan seluruh jumlah penduduk Kabupaten Cirebon	%	1.345.000
		Jumlah Posyandu Purnama	Akumulasi jumlah posyandu setiap tahun	Unit	615
3.	Terwujudnya masyarakat yang berbudaya, berketerampilan, dan berjiwa kewirausahaan	Jumlah kawasan seni	Kawasan seni merupakan hamparan wilayah yang meliputi beberapa desa terdekat. Lokasi kawasan seni ada 2 : Gegesik (Gegesik Wetan, Kidul, Kulon, Lor, Kidul, dan Panunggul) dan Trusmi (Trusmi Wetan, Trusmi Kulon, Panembahan, dan Kalitengah)	Kawasan	1
		Jumlah pertunjukan/pagelaran/festival budaya tingkat nasional	-	Kali	1
		Cakupan peserta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (SPM)	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis kompetensi	%	65

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
			Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan kewirausahaan	%	65
			Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	45
			Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama(PB)	%	60
			Besaran Pekerja/buruh yang menjadi program Jamsostek	%	50
			Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	50
			Besaran Pengujian peralatan di Perusahaan	%	55
		Jumlah wirausahawan baru	Wirausaha baru setiap tahun	Orang	100
Angka pengangguran terbuka	Jumlah Pengangguran terbuka tiap tahun	%	9,1		
4.	Terwujudnya Kabupaten Cirebon sebagai daerah wisata berbasis budaya	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Kenaikan kunjungan wisatawan setiap tahun	%	10
5.	Terwujudnya peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga	Prestasi olahraga di tingkat Provinsi Jawa Barat	Peringkat prestasi olahraga yang mendapat medali dalam pertandingan tingkat Jawa Barat	POPDA	-
				PORDA	-

Misi 3: Mendorong pemerataan pembangunan tematik / sektoral dan kewilayahan berdasarkan potensi yang tersedia

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan koneksitas antar wilayah	Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Akumulasi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Km	594,44
		Jumlah panjang ruas jalan poros desa dalam kondisi baik	Akumulasi panjang jalan poros desa dalam kondisi baik	Km	419,91
2.	Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai	Panjang saluran induk	Akumulasi panjang saluran induk dalam kondisi baik	Km	68,548
		Panjang saluran sekunder	Akumulasi panjang saluran sekunder dalam kondisi baik	Km	35,065
		Bangunan jaringan irigasi	Prosentase bangunan jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	70
		Jumlah rumah tangga berakses air minum untuk keperluan sehari-hari	Akumulasi RT yang terlayani air bersih	Rumah Tangga	118.620
		Jumlah daerah rawan banjir	-	Kecamatan	4
		Prosentase pengangkutan sampah	Jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah terhadap jumlah total penduduk daerah layanan persampahan	%	42
		Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase Skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	Jumlah kumulatif penduduk yang rumahnya terlayani sistem drainase dibagi jumlah kumulatif masyarakat seluruh kota	%	40
		Persentase pengurangan sampah di perkotaan (daerah layanan persampahan)	Persentase Jumlah penduduk yang dilayani yang dilayani melalui kegiatan pengurangan volume sampah (3R) dibagi dengan total	%	33

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	jumlah penduduk Cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya	%	75
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten (pos jaga)	Cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan bencana kebakaran dengan wilayah manajemen kebakaran yang ditandai dengan ketersediaan pos jaga dan prasarana pendukung lainnya	Pos Jaga	12
3.	Terwujudnya Cirebon yang bersih, Asri dan lestari	Jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah mandiri	Kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas 3R	Kelompok	8
		Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Kecamatan yang memiliki RTH \geq 1 Ha	Kecamatan	20
		Prosentase kawasan lindung	-	%	30
		Penghargaan Adipura	Piala adipura	Kali	1
		Jumlah sungai yang memenuhi kualitas baku mutu air	Sungai yang dipantau kualitas airnya	Sungai	5
		Jumlah industri yang memenuhi kualitas baku mutu udara	Industri yang mempunyai cerobong asap	Industri	15
		Jumlah pengaduan kasus dugaan terjadinya pencemaran lingkungan	Menyelesaikan pengaduan kasus pencemaran lingkungan	Pengaduan	12

Misi 4 : Menciptakan sinergi pembangunan secara menyeluruh antar berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademik dan komuniti)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah komunitas	-	Komunitas	85
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	-	Kelompok	85
		Jumlah lembaga ekonomi pedesaan	-	Lembaga	254

Misi 5 : Mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai dan tentram

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	Nilai PDRB	Bersumber dari BPS Kab. Cirebon	Rp (dalam juta)	11.559.249
		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Bersumber dari BPS Kab. Cirebon	%	5,45
		PDRB per kapita	Bersumber dari BPS Kab. Cirebon	Rp	17.811.979
		Tingkat inflasi	Data inflasi merujuk pada tingkat inflasi Kota Cirebon	%	3,5-4,5
		Jumlah daerah rawan pangan	-	Desa	9
		Nilai investasi	Investasi yang terdaftar di BPPT	Rp (dalam juta)	1.128.347
		Prosentase Koperasi aktif	Prosentase koperasi yang aktif terhadap	%	94,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
		Jumlah lokasi wisata kuliner di kecamatan	jumlah koperasi yang ada -	Lokasi	8
2.	Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Prosentase penduduk miskin setiap tahun	%	12,59
		Meningkatnya cakupan listrik bagi penduduk	-	%	100,00

Misi 6 : Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skala 1-4	Point	4,00
		Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan SOP dan SPM	-	Unit	7
		Kecamatan yang menjalankan Pelayanan administrasi Terpadu kecamatan (PATEN)	Terdapat 120 indikator kinerja	Kecamatan	20
2.	Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintahdaerah	Rasio pegawai S2 terhadap jumlah seluruh pegawai	-	%	3,1
		Penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi/latar pendidikan	-	%	95
3.	Terciptanya tata pemerintahan yang baik	Rata-rata capaian kinerja SKPD	-	%	60-70

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Stategis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
	dan bersih				
		Penilaian RAD Pencegahan Penanggulangan Korupsi (PPK)	-	Kriteria	Baik
		Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal	-	%	3
		Peningkatan Pendapatan asli daerah	-	%	15


BUPATI CIREBON,
SUNJAYA PURWADISASTRA

